



RENJA DINSOSP3AKB TAHUN 2025



Jalan Sutan Syahrir No.54

Email : dinsosp3akb@mail.sanggau.go.id

Website : www.Dinsosp3akb.sanggau.go.id

Kode Pos : 78512

Telp : (0564) 2103

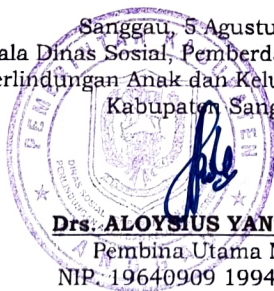
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Pada prinsipnya merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan Program kegiatan Tahun 2025 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, tetapi kami berharap Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan bagi peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau **"Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera"**.

Sanggau, 5 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sanggau



Drs. ALOYSIUS YANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199412 1003

DAFTAR ISI

KataPengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I	
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 DAN CAPAIAN KINERJA	7
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun lalu dan capaian Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau	7
2.2 Analis kinerja pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau	52
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau.	55
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	57
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	77
BAB III	
Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan	79
3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional	79
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinsosp3akb	81
3.3 Program dan Kegiatan	81
BAB IV	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	90
BAB V	
Penutup	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diketahui bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja untuk tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan istilah Renja merupakan dokumen perencanaan yang perangkat daerah dengan terlebih dahulu mengevaluasi realisasi target kinerja tahun sebelumnya dan melakukan proyeksi untuk tahun berikutnya. Dalam kenyataannya dokumen Renja haruslah seiring sejalan dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen referensi perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian dokumen Renja mengacu pada dokumen Rencana Strategis begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja merupakan cikal bakal dari Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dokumen Renja adalah acuan ketika menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen Renja idealnya juga disusun dengan kajian terhadap dokumen Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga serta dokumen Rencana Kerja Provinsi sehingga apa yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau linier dan memiliki kolerasi dengan program nasional dan program provinsi sehingga formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah memiliki sinergisitas sehingga memberikan ruang akselerasi implementasi kebijakan pembangunan berazaskan keadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat di Kabupaten

Sanggau. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja berada pada posisi yang sangat penting bagi perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Renja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan. Untuk itu dipandang perlu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyusun dokumen Rencana Kerja untuk terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta keluarga berencana menuju keluarga yang sejahtera.

Proses Penyusunan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, perumusan rancangan, verifikasi rancangan, perumusan rancangan akhir, verifikasi rancangan akhir, dan penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya

Renstra Tahun 2025-2026 telah disusun sebelumnya sehingga dapat menjadi dasar penyusunan Ranwal Renja 2025 akan dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan untuk menyusun Rencana Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan berfungsi sebagai koridor perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 ini memuat informasi tentang Sasaran, indikator kinerja, target pencapaian kinerja, kebutuhan Pagu indikatif, sumber dana dan prakiraan maju rencana tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Stándar Teknis Pelayanan Dasar pada Stándar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari kekerasan berbasis Gender dalam Bencana.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Stándar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas Kepemendagri Nomor 050-5889 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata cara Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026.

19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencan
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Rencana Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 ini adalah untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat target kinerja, realisasi dan proyeksi. Tujuan disusunnya dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 antara lain :

1. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
2. Memberikan panduan dalam rangka membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau dalam mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan;
3. Menyajikan dokumen sebagai salah satu pedoman dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 diantaranya :

- a. Memberikan arah yang jelas terhadap target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
- b. Memberikan panduan dalam rangka membantu perangkat daerah mencapai serangkaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan.
- c. Menyajikan dokumen sebagai salah satu referensi dalam merumuskan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA RENJA

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 DAN CAPAIAN KINERJA

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun lalu dan capaian Renstra Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB. III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinsosp3akb
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINSOSP3AKAB KABUPATEN SANGGAU

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINSOSP3AKB KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan untuk menemukan dan memecahkan permasalahan dalam bentuk rekomendasi. Dengan melakukan evaluasi akan ditemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang dalam hal ini terkait dengan target realisasi baik dari sisi serapan anggaran maupun kinerja perangkat daerah Dinsosp3akab.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2025-2026. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam perencanaan sehingga meningkatkan efektivitas dan produktivitas sehingga kita dapat mengetahui tingkat kemajuan suatu kegiatan, tingkat pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan tujuan serta hal-hal yang harus dilakukan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memperoleh masukan dalam bentuk rekomendasi dalam rangka memberikan masukan bagi proses dan tahapan kebijakan kedepan sehingga menjadi lebih berkualitas dan berintegritas.

Demikian dapat dimaknai secara umum Rancangan Awaal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional yang tertuang dalam Renstra Dinsosp3akb. Keberhasilan perencanaan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau pada Tahun 2024 memuat 15 (Lima Belas) program dan 35 (tiga puluh lima) dan 116 (Seratus Enam Belas) Sub kegiatan. Pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa sesuai hasil pemetaan untuk tahun 2023 Sub kegiatan yang termasuk dalam SPM wajib untuk di anggarkan, jadi ada 17 (tujuh belas) penambahan sub kegiatan baru terkait SPM pada tahun anggaran 2023. Total alokasi anggaran Dinsosp3akb adalah sebesar Rp.22.949.826.118,-. Dengan realisasi anggaran sebesar 18.066.651.865,-. Dimana pada tahun 2023 terdapat pelabelan sub kegiatan utk PMK Bidang Pendidikan sebesar Rp. 700.000.000,- peruntukan pada pelabelan PMK bidang Pendidikan di ampuh oleh tiga bidang yaitu bidang REhabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	18.983.346.403,-	22.949.826.118,-	18.066.651.865,-	78,72

TOTAL	18.983.346.403	22.949.826.118,-	18.066.651.865,68	78,72
--------------	----------------	------------------	-------------------	-------

Tahapan berikutnya diuraikan rangkaian pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian PPKS

Sasaran 1 ditunjang dengan 6 (Enam) program yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Didukung dengan 8 (Delapan) kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal. Berikut capaian kinerja sasaran 1 tersaji pada tabel:

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kemandirian PPKS	Indikator keluaran : Persentase PPKS yang mandiri	20,00%		
	Program Pemberdayaan Sosial	96,90 %	96,90%	100 %
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	4 Lembaga	4 Lembaga	100 %

	sosial daerah kabupaten/kota			
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	100%	100 %
	Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	200 Orang	200 Orang	100%
	Program Rehabilitasi Sosial	100 %	100%	100 %
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	2978 Orang	2978 orang	100%

	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	100%	100 %
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	628 Orang	628 Orang	100 %
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Penanganan Bencana	100 %	100%	100%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1200 orang	1200 orang	100%
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100 %	100 %	100 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	100%

Indikator Kinerja Sasaran strategis 1 ini adalah :

- Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
- Tingkat Angka Kemiskinan

Sedangkan untuk indikator program pada sasaran 1 ini adalah

1. Program Pemberdayaan Sosial

Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan. Realisasi capaian indikator program Pemberdayaan Sosial adalah 96,90%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertujuan meningkatkan Kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Sanggau. Untuk program Pemberdayaan Sosial didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- ❖ Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dengan target kinerja 16 orang TKSK.
 - ❖ Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Lembaga sosial yang dibina dengan target kinerja 4 (empat) Lembaga sosial setiap tahunnya.
- Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki indikator program yaitu Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibina yang hanya memiliki satu kegiatan adalah Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial dengan indikator Keluaran Jumlah Lembaga Sosial yang mendapat pembinaan, sasaran kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten sanggau dengan target kinerja tahun 2024 sebanyak empat lembaga. Berkaitan dengan aspek pembinaan terhadap keberadaan kelembagaan sosial seperti Karang Taruna, Yayasan Sosial termasuk didalamnya juga sinergi pemberdayaan TAGANA. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 160 Karang Taruna dan 10 Yayasan Sosial di Kabupaten Sanggau.

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, realisasi capaian indikator program ini adalah 100%. Yang berarti terpenuhinya semua target capaiannya yaitu 100%. Adapun indikator dari program tersebut adalah persentase warga negara migran yang terfasilitasi. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang memiliki indikator keluaran

yaitu jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/trafficking yang tertangani dengan target sebanyak 2000 orang selama satu tahun, adapun yang menjadi sasaran kinerja yaitu pekerja eks migran dan orang terlantar yang ada di Kabupaten Sanggau dan menjadi Tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi dan perdagangan orang yaitu Terpenuhinya jumlah pekerja eks migran/orang terlantar/ Trafficking yang tertangani. Pada tahun 2024 kegiatan pelayanan dan perlindungan sosial terealisasi sebesar 94,73%.

3. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terfasilitasi dengan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi capaian indikator program sebesar 100% yang berarti terpenuhinya semua target capaian yaitu penyediaan permakanan, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat serta pemberian layanan rujukan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

❖ Penyediaan Permakanan

Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial. Lanjut usia terlantar yang memperoleh bantuan sosial adalah lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan dan kehidupannya berada pada garis kemiskinan. Lanjut usia terlantar ini mendapat kan bantuan langsung yang difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan sosial tersebut dapat meringankan kehidupan lansia tersebut. Untuk target kinerja Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar memiliki target sebanyak 535 orang lanjut usia terlantar. Dengan indikator hasil dari kegiatan adalah Terpenuhinya jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh kebutuhan dasar dengan target 100%.

❖ Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat. Fasilitas Penerima Bantuan Sosial memiliki sasaran kegiatan yaitu Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas 245 orang untuk tahun 2024, berupa bantuan dana yang bersifat stimulan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan sosial yang diberikan 1 (satu) kali pertahun sejumlah Dua Juta Rupiah (Rp.2.000.000) serta bantuan sembako sejumlah 100 paket bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sanggau. Dalam penyelenggaraan kegiatan ini dibantu Tenaga kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang bertanggung jawab di tiap kecamatan berjumlah 15 orang.

❖ Pemberian Layanan Rujukan

Dengan indikator sub kegiatan yaitu 186 orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kabupaten Sanggau. Penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan di fasilitas oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk mendapatkan perawatan medis secara langsung di Rumah Sakit Jiwa Kota Singkawang dengan bantuan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. Fasilitas penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Orang yang sudah tertangani dengan indikator hasil Terpenuhinya orang dengan gangguan jiwa yang ditangani. Diharapkan dengan adanya kegiatan Fasilitas penyandang Disabilitas dan penyakit kejiwaan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat memberikan kemudahan pada orang dengan gangguan jiwa yang memiliki keterbatasan biaya untuk berobat dapat difasilitasi hingga kembali pulih. Fasilitas yang diberikan berupa melengkapi dokumen kependudukan serta syarat lainnya dalam rangka mengusulkan ODGJ mendapatkan jaminan kesehatan sebagai peserta PBI –ABPD, hingga fasilitas ODGJ mendapatkan

layanan perawatan dan pengobatan hingga resosialisasi ODGJ layak pulang ke keluarga.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator program adalah Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan target kinerja 90% dengan realisasi capaian program sebesar 90% yang berarti terpenuhinya semua target capaian pada 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar dengan satu sub kegiatan yaitu Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dengan target indikator kinerja 9 Panti Asuhan yang mendapat pembinaan dan memberikan pelayanan kesehatan.

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun dengan target 2 Dokumen dalam satu tahun.

❖ Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota memiliki Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Tersedianya Data Kemiskinan Kabupaten Sanggau dengan sasaran kegiatan yaitu jumlah penduduk miskin sebanyak 125.412 Penduduk Miskin (data ini bersifat fluktuatif tergantung hasil verifikasi dan validasi data DTKS melalui aplikasi SIK-NG. Pendataan penduduk miskin merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah dikarenakan data ini akan menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan bantuan sosial pemerintah pusat dan daerah serta titik tolak untuk pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat.

Kegiatan pendataan penduduk miskin akan disinkronisasikan dengan data administrasi kependudukan. Untuk itu, maka telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara DINSOSP3AKB dengan DISDUKCAPIL Kabupaten Sanggau. Untuk pelaksanaan Pendataan Penduduk Miskin, juga bersinergi dengan pihak desa dan kelurahan melalui pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan perbaikan data penduduk miskin. Langkah yang sudah diambil adalah dengan memanfaatkan anggaran Dana Desa untuk

membiayai Honorarium Petugas Operator Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data melalui program SIK-NG. Data kemiskinan harus selalu diupdate agar bantuan sosial dan jaminan kesehatan tepat sasaran dan tepat penerima.

- ❖ Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 1 Dokumen. Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau dituangkan dalam Aplikasi SIDOMPU, dengan adanya aplikasi SIDOMPU memberikan kemudahan dalam hal memverifikasi data kependudukan melalui nomor induk kependudukan sehingga hasil verifikasi tersebut akan dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target kinerja 5 Jenis Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yaitu Bantuan Kube, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Sarana Lingkungan, Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Program Keluarga Harapan.
 - Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai memiliki indikator kinerja program/kegiatan adalah Terlaksananya distribusi Rastra kepada penerima manfaat sebanyak 9.770 Keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan pemerintah. Dengan sasaran kegiatan sebanyak 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau. Indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah Terpenuhinya Distribusi Subsidi beras untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai sendiri Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan Bulog untuk penyaluran Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat serta bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Pihak Himbara (Himpunan Bank Negara) yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, selain itu kegiatan ini juga bekerjasama dengan supplier pihak ketiga

yang turut membantu dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tersebut berupa komoditi telur dan sembako. Penyaluran BPNT ini sendiri dilakukan menggunakan E-Warong untuk beberapa kecamatan yang telah memiliki jaringan internet sehingga dapat memudahkan keluarga penerima manfaat dalam menerima Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2020 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berubah nama menjadi Program Bantuan Sembako dengan jumlah bantuan sebesar Rp.150.000,00 yang diserahkan kepada Keluarga Penerima Manfaat berupa beras, telur serta protein hewani dan Protein Nabati.

- Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan ini memiliki sasaran Keluarga Penerima Manfaat pada tahun 2024 berjumlah 7.901 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan mempunyai Sumber Daya Manusia yang disebut pendamping PKH di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau yang bertugas mendampingi KPM PKH. Program Keluarga Harapan ini bersentuhan langsung kepada masyarakat karena bantuan diterima oleh KPM melalui transfer yang dikirim ke masing-masing rekening KPM PKH. Adapun yang menjadi indikator keluaran kegiatan Program Keluarga Harapan adalah Jumlah keluarga penerima manfaat serta yang menjadi Indikator Hasil adalah Terpenuhinya Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan. Besarnya bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak sama dikarenakan setiap keluarga penerima manfaat memiliki kebutuhan yang berbeda.
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memiliki indikator program yaitu Persentase Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani. Untuk tahun 2024 Program Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni ditargetkan sebanyak 23,05 % selama setahun. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni hanya memiliki satu kegiatan yaitu Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang memiliki indikator keluaran yaitu Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Rehabilitasi Sosial yang memiliki sasaran kinerja Rumah Tidak Layak Huni dan yang menjadi indikator hasil adalah Terpenuhinya Rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni dengan stimulant Bahan Bangunan Rumah. Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau. Kegiatan RTLH disinergikan dengan Nilai DOMPU yang merupakan nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sanggau. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni DOMPU dilaksanakan dengan asas gotong royong dan kerjasama antar semua pihak. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau hanya memberikan bantuan stimulant berupa bahan bangunan kepada masyarakat miskin, sedangkan untuk pekerjaannya diharapkan adanya bantuan dari masyarakat dilokasi RTLH DOMPU dilaksanakan. Program RTLH telah dilaksanakan sejak Tahun 2017 dan untuk Tahun 2023 jumlah RTLH DOMPU dilaksanakan untuk 46 RTLH dan ditambah 1 RTLH bekerjasama dengan TNI (lokasi Desa Semanget Kecamatan Entikong). Sampai dengan Tahun 2019 jumlah proposal pengajuan bantuan RTLH sebanyak 1.167 buah dan untuk tahun 2020 yang dapat ditampung sebanyak 46 buah. Program RTLH ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2024 total RTLH yang sudah teralisasi sebanyak 534 RTLH.

- ❖ Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target kinerja 6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam satu tahun anggaran. Dengan indikator anggaran

Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan.

5. Program Penanganan Bencana

Penanggulangan korban bencana memiliki sasaran kegiatan yaitu Korban bencana yang mana indikator keluaran kegiatan tersebut adalah jumlah Penerima Bantuan Bencana serta indikator Hasilnya berupa Terpenuhinya jumlah penerima bantuan Bencana yang ditangani yang memiliki target kegiatan sebanyak 300 korban bencana selama setahun. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, kebakaran dan tanah longsor serta bencana sosial seperti kerusuhan, konflik sosial dan sebagainya. Bantuan yang diberikan berupa sandang dan pangan yang diharapkan dapat sedikit meringankan beban korban yang tertimpa musibah.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawana memiliki sasaran kegiatan Taman Makam Pahlawana yang memiliki target kinerja selama setahun adalah Tiga Taman Makam Pahlawan yang dipelihara. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawanan ini juga diperuntukan untuk kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Ada 3 TMP yang harus dipelihara di Kabupaten Sanggau yaitu TMP Patriot Bangsa, TMP Pangsuma Meliau dan TMP Temenggung Gergaji Sekayam. Kegiatan ini perlu dukungan pembiayaan agar TMP tidak lagi dianggap lokasi yang kurang baik namun diarahkan bisa dijadikan sebagai lokasi wisata.

Sasaran 2 : Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak

Sasaran 2 memiliki dua indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA), ditunjang dengan 5 (Lima) Program yaitu Program Pengarusutamaan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak didukung dengan 11 (sebelas) kegiatan yaitu Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota; Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota Bidang Pemberdayaan Perempuan. Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota; Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota; Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota; Bidang Perlindungan Anak. Berikut capaian Kinerja sasaran 2 tersaji pada tabel :

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Indeks	Indikator:	61,65	61,65	100%

Pemberdayaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	Madya	Pratama	50%
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100 %	100%	100%
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	100%
	Program Perlindungan Perempuan	100 %	100%	100%

	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	25 Kasus	25 Kasus	100%
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100 %	100%	100%
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam	3 Dok	3 Dok	100%

	kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota			
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	70 %	70 %	100 %
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	100%
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	33 Lembaga	33 Lembaga	100%
	Program Perlindungan Khusus Anak	100%	100%	100%
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%

	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	2 Dok	2 Dok	100%
--	---	-------	-------	------

Dari sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender merupakan sasaran strategis kedua dari Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2019-2024. Sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks pembangunan Gender yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas. Sasaran strategis meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender memiliki Lima program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian program Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun dengan target indikator program 100%. Yang didukung oleh satu kegiatan yaitu kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota dan satu sub kegiatan yaitu Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

Dokumen Indikator Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan indikator Hasil adalah Terpenuhinya penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Pada tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau akan mengikuti kegiatan

Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dan berhasil mendapatkan predikat dengan kategori Pratama. Untuk dapat memperoleh penghargaan tersebut ada tujuh syarat Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam melaksanakan PUG. Adapun ketujuh prasyarat tersebut adalah :

No.	Komponen	Pelaksanaan
1.	Komitmen	Pejabatpengambil keputusan (peraturan tentang pelaksanaan PUG Pusat dan Daerah)
2.	Kebijakan	Adanya RPJMN/RPJMD yang responsive Gender
		Renstra Kementerian/Renstra Eselon 1/SKPD/OPD, Juklak, Juknis.
3.	Kelembagaan (Lembaga)	Adanya Pokja PUG (termasuk 6 Focal Point PUG)
		Adanya rencana tahunan Pokja PUG
		Adanya Laporan Tahunan Pokja PUG
4.	a. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan (capacity buiding PUG/PPRG
		Tersedianya SDM yang sudah mengikuti TOT Fasilitator PUG/PPRG.
	b. Sumber Daya Anggaran	Adanya alokasi anggaran untuk (capacity buiding) PUG/PPRG
		Adanya ARG
5.	Alat Analisis Gender	Alat analisis gender yang digunakan (GAP, Harvard, dll)
6.	Data Gender	Tersedianya Statis gender/Profil gender/data terpilah.
7.	Peran serta masyarakat	Adanya lembaga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PUG

Untuk mendapat kan Anugrah Parahita Ekaparaya, maka ketujuh komponen tersebut harus terpenuhi.

penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam pembangunan memiliki sasaran kegiatan yaitu kaum perempuan Desa Fokus,

Kampung KB, dan Desa Sampel KSI. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah Jumlah kaum perempuan Desa Fokus, Kampung KB dan Desa Sampel KSI yang mengikuti penyuluhan, Indikator hasilnya adalah Terpenuhinya kaum perempuan yang mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari komitmen yang tinggi dalam rangka peran perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak bisa lepas dari peran ibu rumah tangga, maka dari itu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tetap melakukan penyuluhan untuk kemandirian menuju keluarga sejahtera. Untuk Kabupaten Sanggau sendiri kegiatan penyuluhan ibu rumah tangga untuk membangun keluarga sejahtera dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan seperti pembuatan olahan bahan pangan lokal sehingga dapat memiliki daya manfaat yang tinggi, sehingga dapat memberikan keterampilan bagi kaum perempuan terutama ibu rumah tangga yang di Desa Fokus, Kampung KB dan Desa Sampel KSI. Penyuluhan yang diberikan kepada Kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga dengan target sebanyak 240 orang ibu rumah tangga selama satu tahun. Pada tahun 2019 kegiatan tersebut terealisasi sebesar 94,28 %.

pemberdayaan Gender (IDG) dengan target sebesar 61,35 % sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan target 80,55 %. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan memiliki 6 kegiatan untuk menunjang target capaian kinerja diatas. Indeks pembangunan Gender atau biasa yang dikenal dengan IPG adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui pembangunan manusia. IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan

manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM. Apabila angka IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender. Kesenjangan gender dapat dilihat dari selisih antara IPM dan IPG, semakin kecil selisih antara IPM dan IPG maka dapat diartikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan juga semakin kecil. Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki enam kegiatan guna menunjang pertumbuhan IPG dan IDG.

pembinaan organisasi perempuan memiliki sasaran kinerja yaitu Organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sanggau dengan target kinerja sebanyak 40 Organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapun yang menjadi indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah organisasi perempuan yang mendapat pembinaan dan yang menjadi indikator hasil dari kegiatan tersebut adalah terpenuhinya organisasi perempuan yang mendapat pembinaan. Adapun yang menjadi tujuan diselenggarakannya kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah

- a. Meningkatnya komitmen organisasi perempuan dalam program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas penguatan kelembagaan dan jejaring untuk optimalisasi pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Sanggau.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pembinaan organisasi perempuan adalah menggugah partisipasi perempuan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dengan ikut ambil bagian dalam kemajuan pembangunan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan Perempuan memiliki indikator program yaitu Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang

tertangani dengan target kinerja program sebesar 100%. Program tersebut memiliki tiga kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan satu sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota, Kegiatan Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota dengan satu sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota; kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota didukung satu sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Tujuan dari program tersebut adalah untuk meminimalisir dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sehingga perempuan terlindungi dan mendapat pendampingan hukum.

3. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Data Gender dan Anak memiliki indikator program yaitu Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik yang didukung oleh satu kegiatan yaitu Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota. Dan satu sub kegiatan yaitu Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) memiliki indikator program yaitu Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan

pemenuhan Hak anak kewenangan kabupaten/kota, dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota yang didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota dan Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak memiliki indikator Program yaitu Persentase kasus kekerasan anak tertangani yang didukung oleh dua kegiatan yaitu Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota yang didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota. Dan kegiatan yang ke dua yaitu kegiatan Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota yang didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak dengan sasaran kegiatan kepala desa, kepala dusun, Tokoh Masyarakat, Guru, PKK Desa dan anak-anak. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak ini

bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan dan pencabulan terhadap anak serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Untuk tahun 2023 ada tujuh desa yang menjadi target kinerja kegiatan, dengan capaian kinerja sebanyak 83,03 %. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang terkait perlindungan anak bertsentuhan langsung pada anak korban kekerasan atau pencabulan, sehingga anak korban kekerasan atau pencabulan mendapat perlindungan hukum yang langsung difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau hingga proses hukumnya selesai. Indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah jumlah peserta sosialisasi terkait perlindungan anak dengan indikator hasil Terpenuhinya Desa yang telah berkomitmen layak anak.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberhasilan Ber KB

Sasaran	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Keberhasilan Ber KB	Indikator : Total Fertility Rate	2.21	2.21	100%
	Program Pengendalian Penduduk	2.22 Point	2.22 Point	100 %
	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dok	3 Dok	100%

	dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	100%
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	71,23 %	65,00 %	91,25 %
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	6 Dok	6 Dok	100%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	15 Orang	15 Orang	100%
	Pengendalian dan pendistribusian	33 Faskes	33 Faskes	100%

	kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	4 Dok	4 Dok	100%
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	71,04 %	61,23 %	86,19 %
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	12 Kelompok	12 Kelompok	100%

	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Lap	1 Lap	100%
--	---	-------	-------	------

Dari sasaran strategis meningkatnya penduduk yang ber KB memiliki sasaran indikator yaitu Total Fertility Rate dengan target 2,24 pertahun. pada sasaran strategis ini memiliki empat program dan memiliki delapan kegiatan untuk menunjang guna tercapainya Total Fertility Rate. Total Fertility rate ialah istilah yang digunakan dibidang Demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang reproduktifnya. Untuk target sasaran pada indikator sasaran strategis Total Fertility Rate adalah dengan treb angka yang menurun. Karena jika angka kelahiran menurun, maka Program Keluarga Berencana dianggap berhasil. Angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility Rate/ASFR), ASFR 15-19 sebesar 38 berarti bahwa dalam satu juta wanita 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 38 anak selama usia suburnya. Adapun empat program yang dapat mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut adalah :

1. Program Pengendalian Penduduk

Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaitu persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta KB Aktif dengan target kinerja pada tahun 2021 sebesar 66,23%. Program keluarga Berencana memiliki enam kegiatan yang empat kegiatannya bersumber dari dana DAU dan dua kegiatannya bersumber dari Dana DAK. Program Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penaggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Untuk menunjang program keluarga berencana memiliki enam kegiatan, adapun kegiatan tersebut adalah:

- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk.

Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK), Sub kegiatan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan serta sub kegiatan Penguatan Kerjasama pelaksanaan Pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal.

- 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota didukung oleh lima sub kegiatan, dimana kelima sub kegiatan ini yang akan mendukung tercapainya indikator kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

1. Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integritas Program KKBPK disektor lain.
2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga.
3. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga
4. Pengelolaan dan peleporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
5. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan keluarga berencana (KB) memiliki 4 (empat) kegiatan, dimana keempat kegiatan tersebut ada berasal Dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun keempat kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

Kegiatan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi KB sesuai kearifan budaya lokal memiliki lima sub kegiatan yang menunjang tercapainya capaian kinerja pada kegiatan tersebut. Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah :

- 1) Advokasi program KKBPK kepada Steakholders dan mitra kerja.
- 2) Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan Elektronik serta media luar ruang.
- 3) Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Mimilok).

- 4) Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK.
- 5) Pengendalian Program KKBPK.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) didukung oleh satu sub kegiatan, dimana sub kegiatan tersebut di akomodir oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun sub kegiatan tersebut adalah sub kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP).
3. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 Kegiatan pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota didukung oleh empat sub kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun keempat sub kegiatan tersebut adalah:
 - 1) Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
 - 2) Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
 - 4) Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
 Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota

dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Kegiatan ini didukung oleh tiga sub kegiatan dalam menunjang tercapainya capaian kinerja program kegiatan. Adapun ketiga sub kegiatan tersebut adalah :

- 1) Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- 2) Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB
- 3) Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB.

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) didukung oleh 2 (dua) kegiatan. Adapun dua kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh lima sub kegiatan untuk memenuhi capaian kinerja program kegiatan tersebut, dimana program kegiatan tersebut merupakan kegiatan pendukung terhadap program penurunan Stunting. Dimana kegiatan ini didukung oleh lima sub kegiatan untuk dapat menunjang tercapainya target kinerja pada kegiatan tersebut, Adapun kelima sub kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

- 2) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
 - 3) Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
 - 4) Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)
 - 5) Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga didukung oleh satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pendagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan Operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).
- Adapun table Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinsosp3akb dan Pencapaian Renstra Dinsosp3akb s/d Tahun 2023 Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinsosp3akb Tahun 2024)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Dinsosp3akb Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinsosp3akb s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU									22.440.431.264
1 06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	OUTPUT								12.885.424.552
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100%	100%	100%	100%			100%	7.328.387.021
1 06 01 2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	73.998.798
1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	10.451.280
1 06 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	30.326.835
1 06 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	5.754.735
1 06 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.210
1 06 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.210
1 06 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	6.033.978
1 06 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	8.831.550

1	06	01	2.02		Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen		30 Dokumen		5.960.535.299
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	38 Orang	38 Orang	100	38 Orang	38 Orang	3.569.760.156
1	06	01	2.02	02	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	2.081.237.558
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	223.061.265
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	62.458.935
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	5.684.910
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	4.076.520
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	7.727.055
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	6.528.900
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen				38.401.650
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	5.230.890
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100		2 Dokumen	5.889.870
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100		3 Laporan	27.280.890

1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	148.883.365
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 paket	63 paket	63 paket	-	100	63 paket	63 paket	49.612.500
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	3.198.930
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 Dok	2 Dok	6.419.805
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	4.652.130
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	16 Orang	80.000.000
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	35 Orang	35 Orang	5.000.000
1	06	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	435.368.516
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100	5 paket	5 paket	6.119.916
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	10 Paket	115.853.000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	72.795.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	100	8 Paket	8 Paket	30.000.000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	1095 Dokumen	1095 Dokumen	1095 Dokumen	100	1095 Dokumen	1095 Dokumen	9.996.800
1	06	01	2.06	07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	12 Paket	71.104.000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	192 Laporan	100	192 Laporan	192 Laporan	118.654.000
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	5.345.800
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000

1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun	13 Unit	9 Unit	13 Unit	13 Unit			13 Unit	170.000.000
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	0	0	-	1 Unit	1 Unit	130.000.000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100	9 unit	9 unit	40.000.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis			3 Jenis	230.660.593
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	100	256 Laporan	256 Laporan	2.750.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	106.994.053
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	120.916.540
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit			3 Jenis	270.538.800
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	114.450.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	100	40 Unit	94 Unit	44.100.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	111.988.800
					URUSAN SOSIAL									5.557.037.531
1	06	02			PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%			464.070.705
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%		4 Lembaga	464.070.705
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100	16 Orang	16 Orang	142.124.955
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100	4 Lembaga	4 Lembaga	132.231.750
1	06	02	2.03	05	Peningkatan kemampuan sumber daya manusi dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	0	0	0	-	1 Sertifikat	1 Sertifikat	189.714.000

1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%				35.000.000
1	06	03	2.01		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Dokumen Pemulangan Warga Negara Migran yang terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			DAU	35.000.000
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	35.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang tertangani	100%	-	-	-				#REF!
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani	795 Orang	-	-	-		795 Orang	795 Orang	2.735.947.700
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	425 Orang	-	-	-		425 Orang	425 Orang	1.037.728.981
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/kota	471 Orang	-	-	-		471 Orang	471 Orang	50.000.009
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	-	-	-		20 Orang	20 Orang	50.000.064
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	-	-	-		30 Orang	30 Orang	19.999.993
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	-	-	-		250 Orang	250 Orang	9.999.982
1	06	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandang pengemis dan masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	560 Orang	-	-	-		560 Orang	560 Orang	1.191.218.922
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Akta Kelahiran, Surat nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota.	20 Orang	-	-	-		20 Orang	20 Orang	15.000.053
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	-	-	-		141 Orang	141 Orang	19.999.786
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	560 Orang	-	-	-		560 Orang	560 Orang	20.000.094
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-		10 Orang	10 Orang	59.999.854
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	-	-	-		75 Orang	75 Orang	9.999.943
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	-	-	-		370 Orang	370 Orang	252.000.019

1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										18.305.458
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang		4.300.010
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang		9.605.255
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang		4.400.193
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat	90%	90%	90%	90%			9 Panti		1.978.819.302
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan	628 Orang	608 Orang	628 Orang	628 Orang		628 Orang	628 Orang		270.094.702
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang		-
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	10 Orang		-
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	608 Orang	608 Orang	608 Orang	100	608 Orang	607 Orang		270.094.702
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			2 Dokumen		1.708.724.600
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	195.092 Orang	195.092 Orang	195.092 Orang	195.092 Orang	100	195.092 Orang	195.092 Orang		949.881.600
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	100	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga		120.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	100	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga		528.196.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100	6 Orang	6 Orang		110.647.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	100 %	100 %	100 %	100 %					282.933.856
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang		150 Orang	150 Orang		108.716.928
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang		97.224.524
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang		11.492.404
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit		25.000.000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	100	115 Orang	115 Orang		25.000.000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	115 Orang	115 Orang	115 Orang	100	115 Orang	115 Orang		15.500.000

1	06	06	2.02		Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah kelurahan yang dibentuk menjadi kampung siaga bencana	-	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				9.255.620
1	06	06	2.02	01	Koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah kelurahan yang dibentuk menjadi kampung siaga bencana	-	1 Kampung	1 Kampung	1 Kampung	100	-	-	3.021.620
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Mendapat Pembinaan	-	46 Orang	46 Orang	46 Orang	100	-	-	6.234.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100%	100%	100%	100%				41.960.510
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara	3 TMP	3 TMP	3 TMP	3 TMP		3 TMP	3 TMP	41.960.510
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	3 TMP	3 TMP	100	3 TMP	3 TMP	41.960.510
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									2.026.559.594
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun	100%	100%	100%	100%				1.253.988.459
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan indikator APE	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah			3 Dokumen	41.950.510
2	08	02	2.01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	41.950.510
2	08	02	2.02		Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Kaum Perempuan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	74.825.594
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	20.806.319
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	100	2 Organisasi	2 Organisasi	54.019.275

2	08	02	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.137.212.355
2	08	02	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	31 Lembaga	100	31 Lembaga	31 Lembaga	1.053.832.900
2	08	02	2.03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	41.511.444
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	41.868.011
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%				126.612.849
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah		3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	64.715.484
2	08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	64.715.484
2	08	03	2.02		Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang		25 Orang	25 Orang	29.270.400
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	25 Orang	29.270.400
2	08	03	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.626.965
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang	-	-	-			-	-
2	08	03	2.03	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	32.626.965

2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan anak tertangani	100%	100%	100%	100%				215.474.504
2	08	07	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.963.310
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	59.963.310
2	08	07	2.02		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	155.511.194
2	08	07	2.02	01	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	100	12 Orang	12 Orang	45.976.386
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan	Layanan	Layanan	100	Layanan	Layanan	40.882.538
2	08	07	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	100	Masyarakat	Masyarakat	63.532.070
2	08	07	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	5.120.200
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									7.503.881.708
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2.22 point	2.22 point	2.22 point	2.22 point				382.901.121
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen			3 Dokumen	63.111.700
2	14	02	2.01	01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-		-	2 Dokumen	6.930.000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	45.870.000
2	14	02	2.01	05	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	10.311.700

2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	319.789.421
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor lain yang dibentuk.	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	2.880.000
				09	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	64.199.421
2	14	02	2.01	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	72.679.870
				12	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dokumen	-	-	-		2 Dokumen	2 Dokumen	141.000.000
2	14	02	2.01	13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	111.710.000
2	14	02	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	531.652
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	71,23%	71,23%	71,23%	71,23%				4.432.909.397
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen		6 Dokumen		804.335.796
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	100	4 Organisasi	4 Organisasi	4.360.000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah penyuluhan promosi KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100	6 Unit	6 Unit	75.975.796
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	234.500.000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	489.500.000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	39.990.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader IMP yang dibina	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang		15 Orang	15 Orang	811.200.000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100	15 Orang	15 Orang	811.200.000

2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	33 faskes	33 faskes	33 faskes	33 faskes		33 faskes	33 faskes	1.072.638.981
2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	13.581.081
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	12.709 Orang	12.709 Orang	12.709 Orang	100	12.709 Orang	12.709 Orang	150.438.900
2	14	03	2.03	06	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	896.619.000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.744.734.620
2	14	03	2.04	01	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	100	3 Organisasi	3 Organisasi	35.785.498
2	14	03	2.04	02	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	2 Dokumen	-	-	-	-	-	2 Dokumen	1.155.999.910
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	15 Kampung KB	100	15 Kampung KB	15 Kampung KB	552.949.212
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	71,04%	71,04%	71,04%	71,04%				2.688.071.190
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok		12 Kelompok	12 Kelompok	2.674.921.988
2	14	04	2.01	01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Kelompok Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	12 Kelompok	100	12 Kelompok	12 Kelompok	13.430.258
				02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPLS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	12 Unit	-	-	-	-	-	-	126.000.000

2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	100	110 Orang	110 Orang	2.479.100.000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	56.391.730
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabuapten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang		60 Orang	60 Orang	13.149.202
2	14	04	2.02	02	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitrakerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Opsional Pembinaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIR R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	13.149.202

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes). Bidang Sosial merupakan bagian dari Enam urusan wajib pelayanan Dasar yang harus dilaksanakan, Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 khusus untuk bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pengampuh SPM, sudah mengakomodir seluruh sub kegiatan yang ada pada Permendagri 84 Tahun 2022, hal ini bertujuan agar pencapaian SPM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

dapat melakukan pelayanan yang maksimal sesuai dengan target capaian kinerja yang ada pada SPM Bidang sosial, khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Dimana capaian pelaporan SPM rutin dilakukan secara Triwulan kepada Bangda Kemendari. Pada tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau memiliki empat Tematik Program Prioritas yaitu Tematik Stunting, Tematik Kemiskinan, Tematik Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Tematik Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada tabel 2.2 Terlampir:

Tabel 2.2												
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSP3AKB												
Kabupaten Sanggau												
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang tertangani	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti sosial;		96,9	97	97,45	97,75	69,06	69,06	97,45	97,75	
		Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan pengemis luar panti sosial;		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap darurat Bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	97,45	97,45	97,75	
2	Persentase PPKS yang mandiri	%		25,00	25,00	26,50	26,50	25,39	25,39	25,60	25,60	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%		61,54	61,42	61,54	61,65	10,22	10,22	61,54	61,65	
4	Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	%		Madya	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	
5	Total Fertility Rate	Point		2.22	2.23	2.22	2.21	2,18	2,18	2.22	2.21	
6	Nilai AKIP Dinsosp3akb	%		60,00	65,00	68,00	69,00	69,50	69,50	69,50	69,50	

1.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

Seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam menentukan isu-isu strategis serta permasalahan dalam dua tahun kedepan yaitu tahun 2025-2026.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Sosial

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
- b. Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

- a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- b. Pembangunan responsif gender belum maksimal;
- c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak belum memadai; dan
- d. Belum optimalnya sarana, prasarana dan penanganan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Belum maksimalnya Advokasi, KIE perempuan dan anak

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:

- a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); dan
- c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.
- d. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- e. Belum Optimalnya system pencatatan dan pelaporan pengendalian penduduk.

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 terdapat 15 (Lima Belas) Program (Sembilan Belas) Program dan 64 (Enam Puluh Empat) Kegiatan. Setelah melaksanakan Asisten terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau serta menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pada Tahun anggaran 2025 terdapat perubahan jumlah beserta nama program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi 18 (Delapan Belas) Program dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Kegiatan. Pada tahun 2021 terdapat perubahan kodesifikasi dan Nomenklatur dalam penyusunan Rencana Kerja yang tertuang dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana pada bulan mei tahun 2020 telah dilakukan mapping antara permendagri 13 dan permendagri 90 yang dtuangkan kan dalam BA Mapping antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, setelah dilakukan mapping tersebut ternyata pada bulan September 2020 terjadi pemutakhiran terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi Kepmendagri 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas Kepemendagri Nomor 050-5889 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangaunan dan Keuangan Daerah. Sesuai Pemutakhiran Kepmendagri tersebut makan Dinas Sosial, Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau memiliki 15

(Lima Belas) Program, 35 (Tiga Puluh Lima Kegiatan) serta 116 (Sembilan Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

Daftar table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Terlampir :

Tabel 2.4											
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025											
Kabupaten Sanggau											
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Sanggau											
NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINSOSP3AKE KAB.SANGGAU				18.120.006.560					17.670.006.560	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.831.665.919	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.611.671.421	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100%	5.940.098.690	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	100%	5.890.170.032	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	33.910.313	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	38.981.655	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.868.506	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.868.506	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.761.192	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.761.192	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.761.580	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.761.580	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.499.331	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.499.331	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.479.795	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.551.137	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.529.992	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.529.992	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.009.917	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7.009.917	

Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	30 Dokumen	4.860.686.222	Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi		4.860.686.222	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	3.117.357.199	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	3.117.357.199	
Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.514.849.869	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.514.849.869	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	167.263.947	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	167.263.947	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	41.642.387	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	41.642.387	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.975.722	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.975.722	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	9.789.268	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	9.789.268	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.081.114	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.081.114	
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.726.716	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.726.716	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin		7 Dokumen	21.548.055	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.548.055	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.187.255	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.187.255	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.003.380	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	7.003.380	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	12.357.420	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	12.357.420	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	70.355.973	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	23.180.973	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	47.175.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	5.134.971	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	5.134.971	
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	6.621.194	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dok	6.621.194	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	6.849.943	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok	6.849.943	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	4.574.865	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 Orang	4.574.865	
	Administrasi Umum Perangkat daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	10 Jenis	215.055.556	Administrasi Umum Perangkat daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	10 Jenis	215.055.556	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	9.343.980	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	9.343.980	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	30.913.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	30.913.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	28.535.658	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	28.535.658	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	6.603.490	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1095 Dokumen	6.603.490	
	Penyediaan bahan / Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	24.115.000	Penyediaan bahan / Material	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	24.115.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.298.700	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.298.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	100.169.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Laporan	100.169.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	8.500.314	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	8.500.314	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.575.914	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.575.914	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	13 Unit	66.651.615	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	13 Unit	40.881.300	
	Pengadaan Mebel	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Mebeleur yang diadakan	9 unit	14.241.300	Pengadaan Mebel	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Mebeleur yang diadakan	9 Jenis	14.241.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	52.410.315	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	26.640.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	3 Jenis	220.807.256	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	3 Jenis	265.807.256	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	2.472.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	256 Laporan	2.472.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.973.038	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.973.038	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.362.218	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.362.218	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	3 Jenis	451.083.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	3 Jenis	424.029.015	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	114.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	13.630.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	13.630.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	297.453.700	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sanggau, Kapuas, Beringin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	296.399.015	
	URUSAN BIDANG SOSIAL				3.891.567.229					3.721.501.389	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Jumlah PMKS yang terfasilitasi		139.517.540	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Jumlah PMKS yang terfasilitasi		139.517.540	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		Jumlah PMKS yang tertangani	4 Lembaga	139.517.540	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota		Jumlah PMKS yang tertangani	4 Lembaga	139.517.540	
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	114.132.785	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	114.132.785	
	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	25.384.755	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	25.384.755	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi		24.884.805	PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi		24.884.805	
	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal		Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi		24.884.805	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal		Jumlah Warga Negara Migran yang terfasilitasi		24.884.805	
	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Sanggau	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarakasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	24.884.805	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kab. Sanggau	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarakasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan	200 Orang	24.884.805	

	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS Yang tertangani		2.832.904.929	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS Yang tertangani		2.761.258.515	
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		Jumlah PMKS yang tertangani	795 Orang	2.832.904.929	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		Jumlah PMKS yang tertangani	795 Orang	2.761.258.515	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	425 Orang	110.578.003	Penyediaan Permakanan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan Kabupaten/kota	425 Orang	66.496.003	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	471 Orang	28.808.453	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	471 Orang	23.750.550	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	44.917.789	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	32.411.278	
	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	3.380.000	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	3.380.000	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	133.110.000	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	133.110.000	
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	560 Orang	2.200.465.174	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Kab. Sanggau	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	560 Orang	2.200.465.174	2.200.465.174.
	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota,	20 Orang	4.000.000	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan	20 Orang	4.000.000	
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	44.195.800	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	141 Orang	44.195.800	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	560 Orang	4.225.106	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	560 Orang	4.225.106	4.225.106
	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.244.425	Pemberian layanan kedaruratan	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.244.425	
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	5.800.000	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	5.800.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	249.180.179	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Orang	239.180.179	

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat		640.848.254	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat		555.789.033	
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar		Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan	628 Orang	110.536.414	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar		Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan	9 Panti	110.536.414	
	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.737.245	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.737.245	
	Rujukan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.999.443	Rujukan Anak-anak Terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.999.443	
	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	608 Orang	106.799.726	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab. Sanggau	Jumlah panti asuhan yang dibina dalam menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial	608 Orang	106.799.726	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun	2 Dokumen	530.311.840	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun	2 Dokumen	445.252.619	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	206.303.450	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	191.958.450	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	26.524.890	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin Kabupaten Sanggau yang disusun	1 Dokumen	26.524.890	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	5 Jenis Bantuan	264.524.625	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan sosial yang disediakan	5 Jenis Bantuan	193.810.404	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 KUBE	32.958.875	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok usaha bersama yang mendapatkan Bantuan pengembangan Ekonomi yang disediakan	6 KUBE	32.958.875	
	PROGRAM PENANGAN BENCANA		Jumlah Korban Bencana yang tertangani		147.067.101	PROGRAM PENANGAN BENCANA		Jumlah Korban Bencana yang tertangani		133.706.896	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang tertangani		147.067.101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang tertangani		133.706.896	
	Penyediaan Makanan	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	104.039.880	Penyediaan Makanan	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	99.023.880	
	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	34.211.701	Penyediaan Sandang	Kab. Sanggau	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	300 Orang	25.867.496	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Sanggau	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	3.527.420	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Sanggau	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit	3.527.420	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	3.377.500	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	3.377.500	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Sanggau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.910.600	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Sanggau	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.910.600	

	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara		106.344.600	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Jumlah TMP yang mendaot pemeliharaan		106.344.600	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		106.344.600	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				106.344.600	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	106.344.600	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 TMP	106.344.600	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.062.602.072	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.892.596.628	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun	100%	1.077.647.372	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun	100%	1.035.147.372	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah dokumen penyusunan indikator APE	3 Dokumen	84.521.869	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah dokumen penyusunan indikator APE	3 Dokumen	63.271.869	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	84.521.869	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	63.271.869	
	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota				193.533.803	Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota				172.283.803	
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	93.339.404	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	72.089.404	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	100.194.399	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	100.194.399	

	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota				799.591.700	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota				799.591.700	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	646.896.498	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	646.896.498	
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	38.692.423	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	38.692.423	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	114.002.779	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	114.002.779	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani		298.636.744	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				256.136.744	
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani		133.118.167	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Dinsosp3akb			133.118.167	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	133.118.167	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dinsosp3akb	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	133.118.167	
	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani		111.513.384	Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota				90.263.384	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	111.513.384	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Dinsosp3akb	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	25 Orang	90.263.384	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati	1 Dokumen	54.005.193	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota				32.755.193	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang	54.005.193	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100 Orang	32.755.193	

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				<u>221.002.739</u>	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				<u>221.002.739</u>	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau			71.010.744	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau			71.010.744	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	71.010.744	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	71.010.744	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				149.991.995					149.991.995	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	149.991.995	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	149.991.995	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik		<u>44.748.083</u>	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik		<u>34.886.474</u>	
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dokumen	44.748.083	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun	2 Dokumen	34.886.474	
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	44.748.083	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Dokumen	34.886.474	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik		<u>279.015.416</u>	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik		<u>223.870.991</u>	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia	33 Lembaga	279.015.416	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia	33 Lembaga	223.870.991	
	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung perhatian dalam pengembangan kualitas hidup anak	360 Orang	32.341.251	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung perhatian dalam pengembangan kualitas hidup anak	360 Orang	7.051.845	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau			32.298.877	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32.298.877	
	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	1 Dokumen	119.992.536	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	1 Dokumen	90.137.517	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	94.382.752	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	94.382.752	

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kasus kekerasan anak tertangani		141.551.718	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				121.552.308	
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah desa yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Desa	36.268.644	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Persentase kasus kekerasan anak tertangani	3 Desa	36.268.644	
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kab. Sanggau	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	30 Dokumen	36.268.644	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kab. Sanggau	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	30 Dokumen	36.268.644	
Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun	2 Dokumen	105.283.074	Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun	2 Dokumen	85.283.664	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab. Sanggau	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25 Orang	105.283.074	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kab. Sanggau	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25 Orang	85.283.664	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.225.738.569	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.165.738.511	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility Rate (TFR)	2.22 point	320.357.198	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Total Fertility Rate (TFR)	2.22 point	320.357.198	
Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik	3 Dokumen	44.358.277	Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik	3 Dokumen	44.358.277	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	23.983.805	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	1 Dokumen	23.983.805	
Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2 Dokumen	9.350.000	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	2 Dokumen	9.350.000	
Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	11.024.472	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	11.024.472	

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk	2 Dokumen	275.998.921	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk	2 Dokumen	275.998.921	
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	Kab. Sanggau	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor lain yang dibentuk.	2 Unit	65.989.883	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan	65.989.883	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	2 Dokumen	101.400.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	101.400.000	
Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	102.909.038	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	102.909.038	
Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	5.700.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	Kab. Sanggau	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi	2 Unit	5.700.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif	71,23%	2.879.650.838	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				2.879.650.838	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	1.523.953.098	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	1.523.953.098	
Advokasi Program KKBPK Kepada Steakholder dan Mitra Kerja	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	80.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000	
Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Kab. Sanggau	Jumlah penyuluhan promosi KIE program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	6 Unit	818.998.758	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Laporan	818.998.758	
Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	225.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	225.000.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	1 Laporan	149.954.340	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	149.954.340	
Pengendalian Program KKBPK	Kab. Sanggau	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	250.000.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	250.000.000	

250.000.000

	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader IMP yang dibina	15 Orang	507.000.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			507.000.000	
	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	15 Orang	507.000.000	Penggerakan Kader Instituisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader IMP yang dibina	15 Orang	507.000.000
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	33 faskes	411.633.000	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sanggau	Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	33 faskes	411.633.000
	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	31.500.000	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	31.500.000
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	313.383.000	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Kab. Sanggau	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12.709 Orang	313.383.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	66.750.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	66.750.000
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik	4 Dokumen	437.064.740	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kab. Sanggau	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik	4 Dokumen	437.064.740
	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	53.314.740	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Kab. Sanggau	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	53.314.740
	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	2 Dokumen	11.750.000	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	2 Dokumen	11.750.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung KB	372.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Kab. Sanggau	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung KB	372.000.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	71,04%	3.025.730.533	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	71,04%	2.965.730.475	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Sanggau			507.839.339	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				464.046.287	
	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	12 Kelompok	28.800.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 Laporan	28.800.000	
	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPLS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	12 Unit	143.400.541	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	1 Laporan	109.630.541	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /PPKS)	110 Orang	300.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Sanggau	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	20 Unit	300.000.000	
	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	12 Kelompok	35.638.798	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Sanggau	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	12 Kelompok	25.615.746	
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	60 Orang	2.517.891.194	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sanggau	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	60 Orang	2.501.684.188	
	Pendayagunaan Mitra kerja dan Organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'	1 Laporan	54.591.194	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Sanggau	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	1 Laporan	38.384.188	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Laporan	2.463.300.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Sanggau	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1173 Laporan	2.463.300.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025. Dari 15 (Lima belas) program dan 35 (Tiga Puluh Lima) Kegiatan dan 116 (Seratus enam belas) Sub kegiatan ada satu kegiatan lama yang tidak dimasukkan dalam Ranwal 2025, yaitu Kegiatan Penataan Organisasi yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi.

Dari Hasil Musyawarah Pembangunan Daerah tingkat kecamatan untuk tahun 2025 terdapat beberapa usulan dari masyarakat yaitu usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) RTLH yang diusulkan oleh beberapa kecamatan dan yang telah berhasil di Verifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin yang diusulkan untuk tahun 2025. Selain usulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diusulkan oleh Masyarakat ada juga beberapa program kegiatan lain yang diusulkan terkait sosialisasi mengenai peningkatan Kapasitas Perempuan terhadap Pembangunan, Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mulai dari pelaporan hingga rujukan ODGJ menggunakan BPJS untuk dapat di antarkan ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang untuk di lakukan Rehabilitasi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sanggau

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Sanggau.

KEBUTUHAN ANGGARAN HASIL FORUM DESK TAHUN ANGGARAN 2025							
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB.SANGGAU							
NO	KECAMATAN	DESA	USULAN FORUM PD	KEBUTUHAN ANGGARAN			TOTAL
				VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	
1.	BONTI	Desa Kampuh	Bantuan untuk penyandang Disabilitas	10	Orang	2.000.000,00	20.000.000,00
2.	MELIAU	Melobok (2 RTLH), Sungai Kembayau (5 RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7	RTLH	18.589.840,00	130.128.880,00
3.	SEKAYAM	Sungai Tekam (5 RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	5	RTLH	18.589.840,00	92.949.200,00
4.	TAYAN HULU	Janjang (1 RTLH) Berakak (6 RTLH)	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	7	RTLH	18.589.840,00	130.128.880,00
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN							373.206.960,00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki 3 tujuan diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
2. Meningkatkan penanganan pengendalian penduduk dan KB
3. Meningkatkan penanganan kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Dari ketiga tujuan tersebut Adapun yang menjadi sasaran kinerja adalah :

1. Menekan Angka kemiskinan
2. Meningkatnya PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial
3. Meningkatnya penduduk yang ber KB
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Anak
5. Status Capaian Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (Kementrian Sosial)

Untuk meningkatkan peran sektor Sosial sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Sosial pada periode 2015 - 2019 telah menetapkan visi pembangunan sosial, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong ”**. Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan Dua sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan Rentan, 2) Sistem penyelenggaraan Kesejahteraan social yang profesional. Hal ini menjadi panduan bagi Kementrian Sosial dalam penyusunan

rencana strategis ke depan. Dari penjelasan diatas, keterkaitan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan Kementerian terkait (Sosial) sama-sama berperan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memiliki arah kebijakan yaitu :

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran

strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan Misi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memprogramkan beberapa kegiatan yaitu :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sanggau

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						DINSOSP3AKB KAB. SANGGAU				17.670.006.560				27.596.347.616
1	06					Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	OUTPUT			9.611.671.421				15.630.472.815
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketersediaan layanan umum penunjang pemerintahan bidang urusan Sosial, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		100%	5.890.170.032			100%	7.332.116.271
1	06	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		12 Dokumen	38.981.655			12 Dokumen	74.621.178
1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sanggau	2 Dokumen	6.868.506	DAU		2 Dokumen	10.451.280
1	06	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	3.761.192	DAU		1 Dokumen	30.326.835
1	06	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	3.761.580	DAU		1 Dokumen	5.754.735
1	06	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	6.499.331	DAU		1 Dokumen	6.300.210
1	06	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	5.551.137	DAU		1 Dokumen	6.300.210
1	06	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sanggau	2 Laporan	5.529.992	DAU		2 Laporan	6.033.978
1	06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Sanggau	4 Laporan	7.009.917	DAU		4 Laporan	9.453.930

1	06	01	2.02		Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi		30 Dokumen	4.860.686.222				5.960.535.299
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sanggau	38 Orang	3.117.357.199	DAU		38 Orang	3.569.760.156
1	06	01	2.02	02	Penyedia Administrasi Pelaksana tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Sanggau	12 Dokumen	1.514.849.869	DAU		12 Dokumen	2.081.237.558
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Sanggau	1 Dokumen	167.263.947	DAU		1 Dokumen	223.061.265
1	06	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	41.642.387	DAU		1 Dokumen	62.458.935
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sanggau	1 Laporan	2.975.722	DAU		1 Laporan	5.684.910
1	06	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab.Sanggau	1 Dokumen	9.789.268	DAU		1 Dokumen	4.076.520
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab.Sanggau	12 Laporan	5.081.114	DAU		12 Laporan	7.727.055
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab.Sanggau	2 Dokumen	1.726.716	DAU		2 Dokumen	6.528.900
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik yang disusun		7 Dokumen	21.548.055				38.401.650
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sanggau	2 Dokumen	2.187.255	DAU		2 Dokumen	5.230.890
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab.Sanggau	2 Dokumen	7.003.380	DAU		2 Dokumen	5.889.870
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Sanggau	3 Laporan	12.357.420	DAU		3 Laporan	27.280.890

1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun		5 Dokumen	23.180.973			5 Dokumen	68.883.365
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Sanggau	63 paket	-	DAU		63 paket	49.612.500
1	06	01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Sanggau	2 Dok	5.134.971	DAU		2 Dok	3.198.930
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab.Sanggau	2 Dok	6.621.194	DAU		2 Dok	6.419.805
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab.Sanggau	1 Dok	6.849.943	DAU		1 Dok	4.652.130
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab.Sanggau	35 Orang	4.574.865	DAU		35 Orang	5.000.000
1	06	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan		10 Jenis	215.055.556			10 Jenis	365.861.516
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sanggau	5 paket	9.343.980	DAU		5 paket	6.119.916
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab.Sanggau	12 Paket	30.913.500	DAU		12 Paket	72.795.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Sanggau	8 Paket	28.535.658	DAU		8 Paket	30.000.000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Sanggau	1095 Dokumen	6.603.490	DAU		1095 Dokumen	9.996.800
1	06	01	2.06	07	Penyediaan bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab.Sanggau	12 Paket	24.115.000	DAU		12 Paket	71.104.000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Sanggau	12 Laporan	1.298.700	DAU		12 Laporan	3.500.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Sanggau	192 Laporan	100.169.000	DAU		192 Laporan	165.000.000
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Sanggau	5 Dokumen	8.500.314	DAU		5 Dokumen	5.345.800
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Sanggau	1 Dokumen	5.575.914	DAU		1 Dokumen	2.000.000

1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokuemn Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun		13 Unit	40.881.300			13 Unit	240.000.000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.Sanggau	9 unit	14.241.300	DAU		9 unit	120.000.000
1	06	01	2.07	05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.Sanggau	10 Paket	26.640.000	DAU		9 unit	120.000.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan		3 Jenis	265.807.256			3 Jenis	276.029.320
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sanggau	256 Laporan	2.472.000	DAU		256 Laporan	2.472.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sanggau	12 Laporan	165.973.038	DAU		12 Laporan	150.000.000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sanggau	12 Laporan	97.362.218	DAU		12 Laporan	123.557.320
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan		50 Unit	424.029.015			3 Jenis	307.783.943
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sanggau	10 Unit	114.000.000	DAU		10 Unit	178.000.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Sanggau	40 Unit	13.630.000	DAU		94 Unit	29.600.000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Sanggau	1 Unit	296.399.015	DAU		1 Unit	100.183.943
					BIDANG SOSIAL				3.721.501.389				8.298.356.544
1	06	02			PROGRAM PEMBEREDAYAAN SOSIAL	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan		100%	139.517.540				274.356.705
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sanggau yang mendapat pembinaan		4 Lembaga	139.517.540			4 Lembaga	274.356.705
1	06	02	2.03	02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	16 Orang	114.132.785	DAU		16 Orang	142.124.955
1	06	02	2.03	04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	4 Lembaga	25.384.755	DAU		4 Lembaga	132.231.750

1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran yang difasilitasi		100%	24.884.805				35.000.000
1	06	03	2.01		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Dokumen Pemulangan Warga Negara Migran yang terfasilitasi		1 Dokumen	24.884.805			DAU	35.000.000
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	Kab.Sanggau	200 Orang	24.884.805	DAU		200 Orang	35.000.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Yang tertangani		100%	2.761.258.515				2.735.947.700
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang tertangani		795 Orang	2.761.258.515			795 Orang	2.735.947.700
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	471 Orang	66.496.003	DAU		425 Orang	1.037.728.981
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab.Sanggau	471 Orang	23.750.550	DAU		560 Orang	50.000.009
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	20 Orang	32.411.278	DAU		20 Orang	50.000.064
1	06	04	2.01	04	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	30 Orang	3.380.000	DAU		30 Orang	19.999.993
1	06	04	2.01	05	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	250 Orang	133.110.000	DAU		250 Orang	9.999.982
1	06	04	2.01	06	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat.	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab.Sanggau	560 Orang	2.200.465.174	DAU		560 Orang	1.191.218.922
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab.Sanggau	20 Orang	4.000.000	DAU		20 Orang	15.000.053
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	141 Orang	44.195.800	DAU		141 Orang	19.999.786
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Sanggau	560 Orang	4.225.106	DAU		560 Orang	20.000.094
1	06	04	2.01	10	Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	10 Orang	4.244.425	DAU		10 Orang	59.999.854
1	06	04	2.01	11	Pemberian pelayanan penelurusan keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	75 Orang	5.800.000	DAU		75 Orang	9.999.943
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	370 Orang	239.180.179	DAU		370 Orang	252.000.019

1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat		90%	555.789.033			628 Orang	4.477.093.707
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan Bantuan		628 Orang	110.536.414			628 Orang	177.093.707
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	10 Orang	1.737.245	DAU		10 Orang	6.999.661
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-anak terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	10 Orang	1.999.443	DAU		10 Orang	4.999.700
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	608 Orang	106.799.726	DAU		607 Orang	165.094.346
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Kemiskinan yang disusun		2 Dokumen	445.252.619			2 Dokumen	4.300.000.000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab.Sanggau	150.000 Orang	191.958.450	DAU		150.000 Orang	1.000.000.000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	49.957 Keluarga	26.524.890	DAU		49.957 Keluarga	300.000.000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	145.985 Keluarga	193.810.404	DAU		145985 Keluarga	2.000.000.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	50 Orang	32.958.875	DAU		50 Orang	1.000.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan		100 %	133.706.896				525.958.432
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan		1200 Orang	133.706.896			150 Orang	262.979.216
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	Kab.Sanggau	300 Orang	99.023.880	DAU		75 Orang	110.930.930
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah penerima bantuan bencana alam/sosial yang menerima makanan yang disediakan	Kab.Sanggau	300 Orang	25.867.496	DAU		75 Orang	30.003.866
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	15 Unit	3.527.420	DAU		15 Unit	62.805.215
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	300 Orang	3.377.500	DAU		115 Orang	24.376.905
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	300 Orang	1.910.600	DAU		115 Orang	34.862.300

1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100%	106.344.600				250.000.000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang di pelihara	3 TMP	106.344.600			3 TMP	250.000.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	3 TMP	106.344.600	DAU	3 TMP	250.000.000
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.892.596.628				2.461.782.613
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Dokumen Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun	100%	1.035.147.372				2.461.782.613
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan indikator APE		28 Perangkat Daerah	63.271.869		28 Perangkat Daerah	96.186.108
2	08	02	2.01	03	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	28 Perangkat Daerah	63.271.869	DAU	28 Perangkat Daerah	96.186.108
2	08	02	2.02		Pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap Kaum Perempuan yang disusun		4 Dokumen	172.283.803		4 Dokumen	143.885.448
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	72.089.404	DAU	1 Dokumen	55.192.988
2	08	02	2.02	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	2 Organisasi	100.194.399	DAU	2 Organisasi	88.692.460
2	08	02	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang disusun		4 Dokumen	799.591.700		4 Dokumen	2.221.711.057
2	08	02	2.03	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab.Sanggau	31 Lembaga	646.896.498	DAU	31 Lembaga	2.135.294.076
2	08	02	2.03	02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab.Sanggau	200 Orang	38.692.423	DAU	200 Orang	31.336.993
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab.Sanggau	2 Dokumen	114.002.779	DAU	2 Dokumen	55.079.988

2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani		100%	256.136.744				310.119.115
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan linkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani		3 Perangkat Daerah	133.118.167	DAU		3 Perangkat Daerah	80.119.115
2	08	03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	3 Perangkat Daerah	133.118.167	DAU	137.196.484,00	3 Perangkat Daerah	80.119.115
2	08	03	2.02		Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kasus terhadap perempuan yang tertangani	Kab.Sanggau	25 Orang	90.263.384	DAU		25 Orang	130.000.000
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	Kab.Sanggau	25 Orang	90.263.384	DAU		25 Orang	130.000.000
2	08	03	2.03		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kesepakatan bersama antar jejaring yang disepakati		1 Dokumen	32.755.193			1 Dokumen	100.000.000
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab.Sanggau	100 Orang	32.755.193	DAU		100 Orang	100.000.000
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			221.002.739				
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				71.010.744				199.999.582
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	3 Perangkat Daerah	71.010.744	DAU		3 Perangkat Daerah	99.999.851
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				149.991.995				
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	90 Orang	149.991.995	DAU		90 Orang	99.999.731

2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Dokumen Data Gender dan Anak tersusun dengan baik		100 %	34.886.474				81.272.112
2	08	05	2.01		Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak yang disusun		2 Dokumen	34.886.474			2 Dokumen	81.272.112
2	08	05	2.01	01	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab.Sanggau	2 Dokumen	34.886.474	DAU		2 Dokumen	81.272.112
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dokumen Kabupaten Layak Anak yang tersusun dengan baik		70%	223.870.991				241.000.000
2	08	06	2.02		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Kualitas hidup anak yang tersedia		33 Lembaga	223.870.991			33 Lembaga	241.000.000
2	08	06	2.02	01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak	Kab.Sanggau	360 Orang	7.051.845	DAU		360 Orang	36.000.000
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	32.298.877				
2	08	06	2.02	03	Pengembangan komunikasi, informasi dan Edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta forum anak daerah tingkat Kabupaten, kecamatan, Desa/Kelurahan yang dibina	Kab.Sanggau	1 Dokumen	90.137.517	DAU		1 Dokumen	100.000.000
2	08	06	2.02	04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	94.382.752	DAU		1 Dokumen	105.000.000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan anak tertangani		100%	121.552.308				59.963.310
2	08	07	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	36.268.644	DAU		1 Dokumen	59.963.310
2	08	07	2.01	02	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	umlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Kab.Sanggau	Dokumen	36.268.644	DAU		1 Dokumen	59.963.310
2	08	07	2.02		Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang disusun		2 Dokumen	85.283.664			2 Dokumen	128.873.112
2	08	07	2.02	01	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kab.Sanggau	25 Orang	85.283.664	DAU		25 Orang	128.873.112

2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6.165.738.511				9.504.092.188
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)		2.22 point	320.357.198			441.823.121
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang tersusun dengan baik		3 Dokumen	44.358.277		3 Dokumen	60.024.460
2	14	02	2.01	01	Penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota terhadap kependudukan, keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana)	Kab.Sanggau	2 Dokumen	23.983.805	DAU	2 Dokumen	4.875.000
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Kab.Sanggau	1 Dokumen	9.350.000	DAU	1 Dokumen	44.839.140
2	14	02	2.01	05	Penguatan kerjasama pelaksana pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab.Sanggau	1 Dokumen	11.024.472	DAU	1 Dokumen	10.310.320
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Pengendalian Penduduk		2 Dokumen	275.998.921		2 Dokumen	381.798.661
2	14	02	2.02	08	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab.Sanggau	2 Laporan	65.989.883	DAU	2 Unit	2.025.000
2	14	02	2.02	09	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab.Sanggau	1 Laporan	101.400.000	DAU	1 Laporan	64.199.421
2	14	02	2.01	12	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab.Sanggau	2 Dokumen	102.909.038	DAU	2 Dokumen	141.000.000
2	14	02	2.01	13	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab.Sanggau	2 Unit	5.700.000	DAU	2 Dokumen	174.574.240

2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) menjadi peserta kb aktif		71,23%	2.879.650.838				4.813.555.130
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Dokumen Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB		6 Dokumen	1.523.953.098			6 Dokumen	1.187.384.936
2	14	03	2.01	01	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab.Sanggau	1 Laporan	80.000.000	DAU		4 Organisasi	119.999.668
2	14	03	2.01	04	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab.Sanggau	1 Laporan	818.998.758	DAU		6 Unit	150.006.510
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab.Sanggau	1 Laporan	225.000.000	DAU		1 Laporan	195.130.000
2	14	03	2.01	07	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab.Sanggau	1 Dokumen	149.954.340	DAU		1 Laporan	722.248.758
2	14	03	2.01	08	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab.Sanggau	4 Organisasi	250.000.000	DAU		1 Laporan	80.000.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader IMP yang dibina		15 Orang	507.000.000			15 Orang	1.370.200.000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab.Sanggau	15 Orang	507.000.000	DAU		15 Orang	1.370.200.000

2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes yang mendapat pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi		33 faskes	411.633.000			33 faskes	568.062.311
2	14	03	2.03	01	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab.Sanggau	1 Laporan	31.500.000	DAU		1 Laporan	29.700.000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontasepsi jangka pangjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab.Sanggau	12.709 Orang	313.383.000	DAU		12.709 Orang	370.062.311
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab.Sanggau	1 Laporan	66.750.000	DAU		1 Laporan	168.300.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pembinaan kesertaan ber KB yang tersusun dengan baik		4 Dokumen	437.064.740			4 Dokumen	1.687.907.883
2	14	03	2.04	01	Penguatan peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab.Sanggau	3 Organisasi	53.314.740	DAU		3 Organisasi	35.907.973
2	14	03	2.04	02	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Kab.Sanggau	2 Dokumen	11.750.000	DAU & DAK		2 Dokumen	1.155.999.910
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab.Sanggau	15 Kampung KB	372.000.000	DAU & DAK		15 Kampung KB	496.000.000

2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)		71,04%	2.965.730.475				4.248.713.937
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapatkan Pembinaan		12 Kelompok	464.046.287			12 Kelompok	1.785.413.937
2	14	04	2.01	01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab.Sanggau	3 Laporan	28.800.000	DAU & DAK		12 Kelompok	14.113.953
2	14	04	2.01	02	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab.Sanggau	1 Laporan	109.630.541	DAU & DAK		12 Unit	126.000.000
2	14	04	2.01	05	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab.Sanggau	20 Unit	300.000.000	DAU & DAK		110 Orang	1.578.100.000
2	14	04	2.01	06	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kab.Sanggau	12 Kelompok	25.615.746	DAU & DAK		110 Orang	67.199.984
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader yang mendapatkan Advokasi dari mitra kerja/organisasi kemasyarakatan'		1174 Laporan	2.501.684.188			1174 Laporan	2.463.300.000
					Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab.Sanggau	1 Laporan	38.384.188	DAU		1 Laporan	4.261.142
2	14	04	2.02	02	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab.Sanggau	1173 Laporan	2.463.300.000	DAK		1173 Laporan	2.463.300.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana Strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/verifikasi keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
 - h. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang milik daerah
 - c. Penatausahaan barang milik Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
 - c. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - d. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapannya kantor
 - c. Penyediaan bahan logistic kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f. Penyediaan bahan/materian
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 - i. Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan kendaraan Dinasoperasional dan lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
- 2. Program Pemberdayaan Sosial
 - 1) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3. Program Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
 - 1) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa/keluarahan asal.
 - a. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- 4. Program Rehabilitasi Sosial
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
 - a. Penyediaan permakanaan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan alat bantu
 - d. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - e. Pemberianbimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - f. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat.
 - g. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak.
 - h. Pemberian akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar.

- i. Pemberian layanan data dan pengaduan
 - j. Pemberian layanan kedaruratan
 - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 - l. Pemberian layanan rujukan.
- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Pemeliharaan anak-anak terlantar
 - a. Penjangkauan anak-anak terlantar
 - b. Rujukan anak-anak terlantar
 - c. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
 - 2) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
 - c. **Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga**
 - d. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 6. Program Penangan Bencana
 - 1) Perlindungan sosial korban bencana alam sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Makanan
 - b. Penyediaan sandang
 - c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
 - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
 - e. Pelayanan dukungan psikososial
- 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota.
- 8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
 - b. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

- 3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
 - a. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
 - c. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota.

9. Program Perlindungan Perempuan

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota.
- 2) Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.
- 3) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

10. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

11. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- 1) Pengumpulan pengolahan Analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota.

12. Program Pemenuhan Hak Anak

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota.
- 2) Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota.
 - b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.
 - c. Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota.

13. Program Perlindungan Khusus Anak

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.
 - a. Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota.
- 2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota.
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

14. Program Pengendalian Penduduk

- 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota)
 - b. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
 - c. Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal.
- 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk capaian daerah Kabupaten/Kota.

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
- b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
- c. Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
- d. Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
- e. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana.

15. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- 1) Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
 - a. Pengendalian program KKBPK
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
 - d. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - e. Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Steakholder dan Mitra Kerja.
- 2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB /petugas lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
- 3) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota
 - a. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
 - b. Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
 - d. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.

- 4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
 - a. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB
 - b. Integrasi pembanugnan lintas sector di Kampung KB
 - c. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB

16. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- 1) Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS).
 - b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) biaya operasional bagi pengelolaan dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)
 - c. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga /PPKS).
 - d. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/PPKS)
- 2) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga. \

- a. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pergerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS).
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sanggau secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara khusus maka Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mempedomani Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Substansi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau 2025–

2026 2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan. 3. Bidang – bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada jenjang telah ditetapkan. 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.